

Diskominfo Kabupaten Bogor Gelar Rakor Persandian

BOGOR (IM) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Layanan Persandian Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022, di Hotel Grand Mutiara, Megamendung, kemarin.

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rakor menghadirkan narasumber dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Sektor KPP - BSSN dan POLTEK Siber dan Sandi Negara - BSSN. Peserta Rakor diikuti perwakilan ASN pengelola IT/CSIRT di perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rakor membahas implementasi layanan urusan persandian Pemkab Bogor

(Pembuatan Tanda Tangan Elektronik, CSIRT, PHKS/JKS, Vulnerability Assessment)

Mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Iskandar Zulkarnain menuturkan, perkembangan teknologi dewasa ini harus dihadapi tidak bisa tidak.

Sebagai ASN kita harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga akan menunjang kinerja dan memberikan kenyamanan dalam bekerja. Dan tentunya semua harus diimbangi dengan keamanan informasi yang andal, karena buat apa teknologi kalau tidak membuat nyaman dalam bekerja.

Ia menyebutkan, prinsip keamanan informasi adalah bagaimana kita menerima, menyampaikan, dan menyimpan data. Hari ini kita berupaya untuk menumbuhkan, katanya. ● **gio**

Pengesahan Wali Kota tak Pasti, Ini Komentar Yana Mulyana

BANDUNG (IM) - Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memberikan komentar terkait kursi Wakil Wali Kota Bandung yang terancam tidak dapat diisi. Sebab, pengajuan nama Wakil Wali Kota Bandung telah melewati batas waktu 20 Maret.

Selain hal itu, pengesahan pengajuan Yana Mulyana menjadi Wakil Wali Kota Bandung definitif dari Kemendagri pun masih belum dipastikan waktunya. DPRD Kota Bandung belum mengetahui informasi dari Kemendagri tentang surat keputusan tersebut.

"Kan begini. Ini kan jalan hidup, saya juga enggak tahu bakal tiba-tiba seperti ini. Jadi ya saya harus jalani dan harus dengan segala konsekuensinya begitu ya," kata Yana Mulyana, Selasa (22/3).

Yana Mulyana menyebut bahwa saat ini dia merasa lelah karena bekerja sendiri tidak ditemani oleh Wakil Wali Kota Bandung. Terlebih, beban dua pekerjaan harus

dikerjakan oleh sendiri sesuai dirinya mengemban tugas sebagai Plt Wali Kota Bandung.

"Kalau sekarang lelah. Iya lah gitu ya, karena dua pekerjaan sekarang hanya sama satu orang," ucapnya.

Terkait keputusan Plt Wali Kota Bandung menjadi definitif, Yana Mulyana mengaku tidak mengikuti proses perkembangan tersebut. Pihaknya saat ini akan mengikuti sesuai alur dan regulasi.

"Saya enggak tahu. Karena saya sih orang taat azas gitu ya. Saya mengalir saja gitu ya, dan ini kan saya enggak bisa ikut diproses ini, gitu ya karena prosesnya ada di provinsi, ada kementerian dalam negeri gitu ya," ujar dia.

Diketahui awal Maret 2022, DPRD Kota Bandung mengajukan Plt Wali Kota Bandung ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi Wakil Wali Kota Bandung definitif. Hingga saat ini surat keputusan tersebut belum turun. ● **pra**



IDN/ANTARA

TRADISI NGALOKAT CAI

Pelajar mengambil air untuk melaksanakan perang air saat upacara Tradisi Ngalokat Cai di Situ Cileunca, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3). Tradisi tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas keberadaan air yang melimpah untuk manfaat bagi kehidupan sekaligus menjadi peringatan Hari Air Sedunia 2022.

Cimahi Kota dengan Pengangguran Tertinggi, Nasib Disabilitas Makin Terpinggirkan

BANDUNG (IM) - Dengan kenyataan bahwa Cimahi sebagai kota dengan tingkat pengangguran tertinggi, maka nasib kaum disabilitas pun makin terpinggirkan.

Ada fakta mencengangkan! Baru tujuh dari 819 perusahaan swasta di Kota Cimahi yang menawarkan pekerjaan kepada para penyandang disabilitas.

Hal itu menjadi beban Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi untuk mencari jalan keluar terkait nasib para disabilitas.

Kepala Disnaker Kota Cimahi, Yanuar Taufik meminta perusahaan swasta untuk menarik penyandang disabilitas. "Karena sesuai ketentuan perusahaan swasta wajib mengakomodir sedikitnya 1 persen penyandang disabilitas," katanya.

Ia mengaku, pihaknya pun terus mendorong semua perusahaan di Kota Cimahi untuk mengetahui para penyandang disabilitas sesuai dengan aturan, yakni 1 persen dari total pegawai di perusahaan tersebut.

"Terakhir kemarin kita sudah melakukan sosialisasi lagi dengan memanggil perwakilan perusahaan. Kita tekankan untuk agar tidak

mengakomodir paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas," ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pihaknya meminta perusahaan untuk menyediakan fasilitas untuk tenaga kerja membutuhkan khusus melalui pelayanan antar kerja.

"Kita juga minta informasi seputar lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan sampai ke mereka," sebutnya.

Ia menilai, jika semua perusahaan telah memiliki para penyandang disabilitas sesuai aturan, maka mengurangi jumlah beban di Kota Cimahi yang angkanya masih tertinggi di Jawa Barat.

"Angka-angka di Kota Cimahi masih menjadi yang tertinggi di Jawa Barat berdasarkan data yang dirilis tahun 2021, yakni mencapai 38.193 orang atau 13,07 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 292.252 orang," bebernya.

Ia menambahkan, jumlah tersebut memang turun sedikit dari tahun 2020 yang mencapai 39.436 orang atau 13,30 persen.

"Memang ada pengurangan dibandingkan tahun 2020 berdasarkan data BPS. Kita memang tertinggi," bebernya. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



DISTRIBUSI MINYAK GORENG BAGI FORUM RW

Anggota Forum RW menerima minyak goreng saat distribusi minyak goreng bagi Forum RW se-Kota Bandung di Kantor Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3). Pemerintah Kota Bandung mendistribusikan sebanyak 1.200 liter minyak goreng kepada 30 Forum RW se-Kota Bandung dalam rangka bantuan sosial minyak goreng gratis.

Ade Yasin Lebih Pilih Bangun Jalur Puncak 2 Dibandingkan Kereta Gantung

Dibandingkan dengan Jalur Puncak 2, Ade Yasin mengatakan, kereta gantung dominan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang akan berwisata ke kawasan Puncak. Sedangkan untuk masyarakat yang hendak pergi ke Kabupaten Cianjur atau Bandung melalui Puncak, Jalur Puncak 2 lebih menjanjikan.

BOGOR (IM) - Biaya pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, mulai dari Citeureup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu tidak akan mencapai Rp 7,31 triliun. Dibandingkan dengan Jalur Puncak 2, Ade Yasin mengatakan, kereta gantung dominan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang akan berwisata ke kawasan Puncak. Sedangkan untuk masyarakat yang hendak pergi ke Kabupaten Cianjur atau Bandung melalui Puncak, Jalur Puncak 2 dinilainya lebih menjanjikan.

"Saya kira kalau kereta gantung untuk wisatanya aja. Tapi

Puncak 2 yang akan membentang di lima kecamatan di Kabupaten Bogor, mulai dari Citeureup, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, dan Cariu tidak akan mencapai Rp 7,31 triliun.

Dibandingkan dengan Jalur Puncak 2, Ade Yasin mengatakan, kereta gantung dominan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang akan berwisata ke kawasan Puncak. Sedangkan untuk masyarakat yang hendak pergi ke Kabupaten Cianjur atau Bandung melalui Puncak, Jalur Puncak 2 dinilainya lebih menjanjikan.

"Saya kira kalau kereta gantung untuk wisatanya aja. Tapi

kepentingan masyarakat yang akan menuju Bandung, Cianjur, kurang terbantu. Kalau Jalur Puncak 2 kan keluarnya di Cianjur, yang ke Bandung bisa lewat situ," jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, mengatakan rancangan pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak belum masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Baik pada Kereta Automated Guideway Transit (AGT) dan Kereta Gantung (cable car).

Suryanto menjelaskan, pihaknya akan melihat terlebih dahulu hasil kajian dari BPTJ Kemenuh terkait rencana pembangunan kereta gantung. Ia mengaku telah menerima paparan dari BPTJ pada pekan lalu.

"Kita akan lihat hasil kajian dari BPTJ. Dengan anggaran yang begitu besar apakah masih layak dilanjutkan. Jika layak, akan kita masukkan dalam RTRW," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan wacana pembangunan kereta gantung dari Pemerintah Pusat

tidak lain bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Wacana tersebut adalah wacana dari pemerintah pusat. Dan kita apapun yang sudah

dicanangkan pemerintah pusat pasti sudah dikaji, dianalisis, sehingga tujuannya buat kebaikan masyarakat," kata Rudy. ● **gio**

Wabup Bogor Iwan Setiawan Kunjungan Kerja ke Lombok



Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Lombok Tengah.

BOGOR (IM) - Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Lombok Tengah, dalam rangka menggali informasi mengenai pengelolaan wisata dan olahraga di Lombok Tengah, terlebih dengan adanya Sirkuit Mandalika, meskipun sirkuit itu milik Pemerintah Pusat namun berada di wilayah Lombok Barat.

Kunjungan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan wisata dan olahraga di Kabupaten Bogor, mengingat Kabupaten Bogor juga memiliki Sirkuit Sentul.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, banyak yang dibahas di pertemuan kali ini khususnya di Bidang Pariwisata dan Olahraga, terutama keterlibatan Pemerintah Daerah Lombok

Tengah dengan Pemerintah Pusat di dalam pembangunan Sirkuit Mandalika.

"Senin, hari terakhir saya berkegiatan di Wilayah Lombok, banyak yang dibahas dalam pertemuan kali ini salah satunya mengenai pengelolaan wisata dan olahraga," ungkap Wabup Iwan, dalam siaranannya Selasa (23/3).

Wabup Iwan mengaku, kagum dengan keindahan wisata di Lombok Tengah, juga kagum terhadap arsitek gedung kantor yang cukup megah.

"Menurut saya cukup megah, terima kasih kepada Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah dan segenap jajaran Pemda Lombok Tengah atas penerimaan serta sharing ilmu yang sangat bermanfaat, semoga bisa kami implementasikan di Kabupaten Bogor," imbuh Wabup. ● **gio**

TERKAIT KADES SADENG NGAMUK

Bupati Bogor Bakal Evaluasi Pelayanan di RSUD Leuwiliang

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menanggapi viralnya video Kepala Desa (Kades) Sadeng terkait buruknya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang.

Menurutnya, insiden itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pihak RSUD dan Kades.

Namun demikian, kata Ade, sebagai Bupati Bogor ia akan mengevaluasi pelayanan RSUD Leuwiliang

"Mungkin karena peristiwa kemarin itu, mungkin ada ketidaksihinggaan atau apa barangkali, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kedepan agar pelayanan seluruh RS di Kabupaten Bogor lebih maksimal," kata Ade Yasin kepada wartawan pada, Selasa (22/3).

Bupati juga mengatakan, berdasarkan laporan dari jajarannya, saat itu mobil untuk membawa jenazah memang sedang digunakan membawa pasien lain.

Kendati demikian, Ade Yasin meminta agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali.

"Seharusnya pasien yang sudah meninggal itu diminta menunggu sementara, meskipun mobil ambulans dan jenazah tidak sama, tetapi mungkin itu situasinya seperti apa," katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kades Sadeng, Yanuar Lesmana menjelaskan, amarahnya menuncak lantaran adanya dugaan keterlambatan dari pihak RSUD sehingga warganya kehilangan nyawa di Unit Gawat

Darurat (UGD). Menurutnya, warganya itu tak mendapatkan penanganan awal sehingga nyawanya tak dapat ditolong.

"Saat kita meminta mobil ambulans atau jenazah, mereka tidak memberi dengan alasan supirnya sedang istirahat. Di sini saya berfikir saya adalah Kades, lalu bagaimana kalau masyarakat biasa," tuturnya.

Ia menegaskan, mewakili Kades se-kecamatan Leuwisadeng, menurutnya tak sedikit warga yang mengalami pelayanan buruk RSUD Leuwiliang.

"Dari persoalan ini, mudah-mudahan didengar oleh Kadinkes Kabupaten Bogor, Mike Kaltarina bahwa pelayanan rumah sakit itu sangat kurang baik. Saya meminta Kadinkes segera turun tangan ke RSUD Leuwiliang dan mengganti Direktur Utama (Dirut) karena mereka tidak tahu keluhan masyarakat susah," tuturnya.

Yanuar pun amat menyesalkan adanya klarifikasi yang dinilai kurang bertanggungjawab dari pihak RSUD Leuwiliang.

"Saya sangat menyesal terkait adanya bahasa bahwasanya jenazah bukan pasien RSUD. Sebab kita sudah daftar, kita sudah dapat kartu pendaftaran, diurus tidak, ditangani tidak, malah diomong itu bukan pasien RS, kan gila. Jadi ke depan jika RS seperti itu, maka masyarakat akan saya larang untuk berobat kesana, sama aja memberikan nyawa," pungkasnya. ● **gio**

Taman Manunggal Mulai Dibangun Awal April

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) segera membangun lapangan Manunggal menjadi taman tanpa menghilangkan fungsinya sebagai lapangan sepakbola.

Bahkan dengan anggaran Rp4,5 miliar, nantinya lapangan sepakbola akan menggunakan rumput sintetis sehingga bisa lebih mudah perawatannya dan penggunaan lebih nyaman.

Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Disperumkim Kota Bogor, Irfan Zacki Faizal, mengatakan tahun 2022 ini pembangunan taman Manunggal akan dimulai.

Ditargetkan akhir bulan April atau awal Mei 2022 sudah mulai dibangun karena selangnya sendiri akan dilaksanakan pada awal April 2022.

"Ya, kalau tidak ada kendala selesai selangnya ya. Untuk desain masih sama dengan tahun 2018, kami hanya mereview saja dikit. Karena dikha-

watirkan akan ada sedikit perubahan desain dan kendala," ungkap Irfan, Selasa (22/3).

Irfan melanjutkan, secara garis besar tak ada yang berubah dari desain taman dibandingkan dengan lapangan yang sudah ada.

Menurutnya sudah ada penyesuaian dengan rencana pembangunan ball park pusat tanaman obat yang jadi salah satu target Kementerian Pertanian (Kementan) ditahun 2022 atau 2023.

"Pertemuan juga sudah dilakukan secara intens, sudah ada pertemuan langsung beberapa kali. Untuk anggaran pembangunan taman Manunggal sekitar Rp4,5 miliar, insya Allah dikerjakan 150 hari kalender atau lima bulan. Karena pengerjaan tidak terlalu rumit, dibangun lapangan, taman sedikit dan nanti ada podium, pos dan mushola. Lapangan tetap bisa digunakan untuk bermain sepakbola," terangnya.

Irfan menjelaskan, lapan-



IDN/ANTARA

FESTIVAL EKONOMI BANGKIT JAWA BARAT

Penjaga stan menyiapkan produk yang akan ditampilkan pada Festival Bangkit Ekonomi Jawa Barat yang diadakan di Pusdai, Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/3). Festival yang menampilkan produk unggulan asli Jawa Bara tersebut di gelar dalam rangka pemulihan ekonomi nasional saat pandemi COVID-19.